

BAB I

LATAR BELAKANG

A. Latar Belakang Penelitian

Perusahaan merupakan sebuah lembaga yang diorganisasikan dan dijalankan untuk menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat. Perusahaan melakukan kegiatan ekonominya untuk memajukan perekonomian suatu bangsa dimana semua perusahaan mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan para pemegang sahamnya dan bagaimana perusahaan dapat memperoleh laba yang tinggi. Oleh sebab itu, perusahaan dituntut untuk meningkatkan kreatifitas, efektifitas, inovatif dan efisiensi untuk dapat bersaing di dunia bisnis yang semakin berkembang pesat dalam mencapai kesejahteraan. Pada umumnya perusahaan didirikan dengan tujuan untuk mencapai laba atau keuntungan yang optimal. Untuk mencapai tujuan tersebut, perusahaan selalu berusaha mencari peluang dan kesempatan untuk melakukan sesuatu yang dapat memberikan nilai tambah, agar tujuan perusahaan tercapai. Jika hal itu tidak dapat dikendalikan, kemungkinan dapat muncul dampak-dampak negatif yang dapat merugikan lingkungan dan masyarakat. Hal tersebut dapat terjadi, karena pada umumnya perusahaan masih menjalankan prinsip kapitalis, dalam menjalankan aktivitasnya, yaitu mencapai laba yang maksimal dengan biaya yang minimal dengan menghalalkan segala cara, sehingga tidak sedikit dampak-dampak negatif ditimbulkannya.

Beberapa tahun belakangan ini banyak kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh perusahaan-perusahaan yang tidak bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat. Kerusakan lingkungan kerap sekali dilakukan oleh perusahaan demi kepentingan perusahaan tidak untuk masyarakat. Kasus kerusakan yang terjadi hingga saat ini belum dapat teratasi adalah kasus pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh PT Semen Indonesia pada tahun 2014. Selain itu kasus yang terjadi pada 30 Maret 2016 yang dilansir pada www.mongabay.co.id (2016) terdapat perusahaan yang mencemari lingkungan permukiman di Jawa Timur. Perusahaan tersebut melakukan pencemaran pengolahan limbah B3 yang dilakukan oleh PT. Putra Restu Ibu Abadi (PT. PRIA) yang mengindikasikan adanya pelanggaran izin pengolahan dan pemanfaatan limbah B3 ini yang didasari oleh beberapa hal yaitu menimbun limbah B3 rumah sakit yang dicampur dengan limbah padat B3 lainnya dalam lubang yang kemudian dibangun jalan dan perluasan gudang. Selain itu, terdapat penampungan limbah cair B3 tanpa pelapis kedap air, serta mempekerjakan masyarakat yang memilah limbah tanpa alat pelindung. Hal itu tentu saja memberikan dampak yang sangat merugikan terutama untuk kesehatan masyarakat di sekitar perusahaan seperti batuk, sesak nafas, gatalgatal dan panas tinggi.

Dengan kasus-kasus tersebut, perusahaan telah melakukan pelanggaran sosial yang harus segera diatasi. Apabila tidak segera diatasi, hal ini akan mengakibatkan pandangan atau citra buruk terhadap perusahaan di mata masyarakat terutama oleh para pemegang saham. Oleh karena itu,

tuntutan terhadap perusahaan semakin besar disebabkan sebagian besar perusahaan di Indonesia masih banyak yang hanya berfokus pada pengungkapan laporan keuangan saja. Sudah seharusnya perusahaan di Indonesia melakukan pertanggungjawaban yang diiringi dengan adanya transparansi pelaporan aktivitas sosial perusahaan. Tindakan transparansi ini akan memotivasi perusahaan untuk selalu berupaya menjalankan usaha dengan baik guna meningkatkan kualitas hidup dan lingkungan yang dapat memberikan manfaat untuk perusahaan dan masyarakat Indonesia. Selain itu, hal ini dapat menambah dan memperbaiki nilai perusahaan yang berdampak langsung dalam hubungan investor atau *stakeholder* karena pada saat ini investor tertarik terhadap informasi tambahan yang dilaporkan dalam laporan tahunan perusahaan.

Pada beberapa tahun terakhir ini, perusahaan di Indonesia mulai menyeimbangkan antara perbaikan lingkungan atas kegiatan yang telah dilakukan perusahaan dengan orientasi keuntungan. Menurut Dunphy, dkk (2000) kebutuhan para investor dan *stakeholder* akan informasi kinerja dari tahun ke tahun terus meningkat, bukan hanya sekedar informasi keuangan melainkan juga informasi-informasi terkait tentang ekonomi, sosial dan lingkungan. Informasi tersebut berhubungan erat dengan pembangunan berkelanjutan atau *sustainable development* yang tidak hanya mengungkapkan pembangunan ekonomi dan sosial, tetapi juga meningkatkan derajat lingkungan hidup sosial.

Pentingnya informasi tambahan yang sangat berdampak baik terhadap perusahaan, maka muncul laporan keberlanjutan yang disebut sebagai *Sustainability Report*. *Sustainability Report* adalah laporan yang memuat informasi tentang keuangan maupun non-keuangan yang terdiri dari kinerja keuangan, aktivitas sosial, dan lingkungan yang memungkinkan perusahaan dapat bertumbuh secara berkesinambungan (*sustainable performance*). Saat ini *sustainability report* semakin berkembang yang dibuktikan dengan munculnya *The Global Reporting Initiative* (GRI) yang mendorong penerapan pelaporan keberlanjutan sebagai cara bagi perusahaan dan organisasi agar menjadi lebih berkelanjutan dan berkontribusi pada ekonomi global yang berkelanjutan.

Laporan keberlanjutan yang disebut sebagai *sustainability report*, membantu para pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang mulai tidak hanya mengandalkan laporan keuangan dari laporan neraca, laporan laba rugi, catatan atas laporan keuangan dan arus kas untuk dijadikan dasar para investor mengambil keputusan investasi dalam kegiatan bisnisnya. Melaporkan *sustainability report* merupakan kepedulian perusahaan terhadap lingkungan. Allah SWT memerintahkan umatnya agar dapat menjaga dan mengelola sumber daya dengan sebaik-baiknya tanpa mengganggu kelangsungan hidup makhluk lain. Dengan demikian, setiap manusia wajib menjaga kelestarian lingkungan dan tidak melakukan kerusakan di bumi. Hal tersebut tertuang dalam Q.S. Ar-Rum ayat 41-42 yang artinya:

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari

(akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)” (41).

Katakanlah:

“Adakanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang terdahulu, kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan (Allah)” (42)

Menurut Wibisono (2007) implementasi tanggung jawab sosial pada umumnya dipengaruhi oleh faktor-faktor terkait dengan komitmen pemimpin, penerapan *good corporate governance* (GCG), ukuran perusahaan, kematangan (umur) perusahaan, regulasi dan sistem perpajakan. Dalam menjalankan mekanisme GCG, perusahaan tidak hanya memperhatikan nilai ekonomi dari kegiatannya tapi juga nilai tambah lain seperti keseimbangan kepentingan *stakeholders* dan kepatuhan terhadap peraturan serta norma yang berlaku atas kegiatan yang dilakukan. Jadi semakin baik penerapan GCG maka semakin baik pengungkapan *Sustainability Report* perusahaan (Handayani, 2007). Pada penelitian kali ini, penerapan *corporate governance* akan dilihat melalui mekanismenya yang diproksikan dengan proporsi Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Saham Institusional, Kepemilikan Asing, Rapat Dewan Direksi, Rapat Komite Audit dan Kepemilikan Manajemen.

Faktor pertama yang diduga mempengaruhi tingkat pengungkapan *Sustainability Report* adalah proporsi dewan komisaris independen. Menurut UU PT No. 40 Tahun 2007 dewan komisaris adalah organ perseroan yang memiliki tugas untuk mengawasi dan memberikan nasehat kepada dewan direksi. Dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan afiliasi dengan

perusahaan disebut sebagai dewan komisaris independen. Apabila jumlah Dewan Komisaris Independen semakin besar atau dominan, hal ini dapat memberikan tekanan pada Dewan Komisaris untuk menekan manajemen untuk meningkatkan kualitas pengungkapan perusahaan (Waryanto, 2010). Pernyataan itu juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan Sari dan Marsono (2013), Putri (2013) dan Aelia (2015) dimana semakin besar persentase Komisaris Independen maka dapat meningkatkan aktivitas pengawasan terhadap kualitas pengungkapan dan mengurangi usaha menutupi informasi perusahaan.

Faktor kedua yang diduga mempengaruhi tingkat pengungkapan *Sustainability Report* adalah kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional adalah proporsi saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau badan. Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat menghalangi perilaku *opportunistic* manajer Sari dkk (2013). Dengan demikian adanya kepemilikan institusional dapat mendorong luasnya pengungkapan *sustainability report*. Pernyataan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Soedarno dan Nurrahman (2013).

Faktor ketiga yang diduga mempengaruhi tingkat pengungkapan *Sustainability Report* adalah kepemilikan asing. Kepemilikan asing adalah jumlah saham perusahaan yang dimiliki oleh pihak asing. Perusahaan dengan kepemilikan saham asing biasanya lebih banyak menghadapi asimetri informasi dikarenakan keterbatasan letak geografis dan bahasa. Oleh karena

itu, perusahaan dengan kepemilikan saham asing yang besar akan mendorong manajemen untuk melaporkan atau mengungkapkan informasinya secara lebih luas (Huafang dan Jianguo, 2007). Pernyataan ini sejalan dengan penelitian Daljono dan Adhipradana (2014) yang menyatakan bahwa perusahaan yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh pihak asing cenderung akan lebih luas melakukan pengungkapan tanggungjawab sosialnya.

Faktor keempat yang diduga mempengaruhi tingkat pengungkapan *Sustainability Report* adalah dewan direksi. Dewan direksi atau *board of directors* adalah pimpinan perusahaan yang ditunjuk oleh para pemegang saham untuk mewakili kepentingan mereka dalam mengelola perusahaan. Salah satu cara dewan direksi dalam mewujudkan *good corporate of governance* dengan melaksanakan tugas pengawasan atas aktivitas perusahaan secara efektif. Oleh karena itu, untuk membuktikan bahwa suatu perusahaan telah mewujudkan *good corporate governance* adalah dengan mengungkapkan *sustainability report*. Pernyataan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Luthfia (2012) dan Idah (2013) yang menyatakan bahwa dewan direksi berpengaruh positif terhadap *sustainability report*.

Faktor kelima yang diduga mempengaruhi tingkat pengungkapan *Sustainability Report* adalah komite audit. Komite audit merupakan komite yang dibentuk perusahaan untuk mengkaji kebijakan akuntansi perusahaan, menelaah sistem pelaporan, dan memberikan pengawasan auditor. Komite

audit yang sering mengadakan rapat akan meningkatkan kualitas koordinasi komite audit, sehingga terciptanya pengawasan laporan yang baik. Menurut Suryono (2011) melalui jumlah pertemuan komite audit akan semakin mampu mendorong manajemen untuk melakukan praktik pengungkapan *sustainability report* sebagai media komunikasi perusahaan dengan *stakeholders* dalam rangka memperoleh legitimasi melalui *good corporate governance*. Oleh sebab itu, melalui rapat yang sering dilaksanakan semakin mendorong perusahaan untuk melakukan pengungkapan. Pernyataan ini sejalan dengan penelitian Aniktia dan Khalid (2015) yang menyatakan bahwa jumlah rapat komite audit berpengaruh positif terhadap *sustainability report*.

Faktor keenam yang diduga mempengaruhi tingkat pengungkapan *Sustainability Report* adalah kepemilikan manajerial. Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham oleh manajemen perusahaan. Di dalam kepemilikan manajerial tidak terdapat konflik kepentingan antar manajer dan pemilik perusahaan, yang ada hanyalah keselarasan tujuan dalam mewujudkan pertumbuhan perusahaan. Perusahaan dimana di dalamnya terdapat kepemilikan manajerial yang tinggi akan terdorong untuk mengungkapkan informasi mengenai tanggungjawab sosial dan lingkungan kepada *stakeholders* serta masyarakat. Sehingga semakin besar proporsi kepemilikan manajemen pada perusahaan, maka manajemen cenderung berusaha lebih giat untuk kepentingan pemegang saham yang tidak lain adalah dirinya sendiri (Widi, 2009). Pernyataan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Handita (2016) yang menemukan bahwa adanya

hubungan positif antara presentase kepemilikan manajerial dengan penungkapan *sustainability report*.

Melihat fenomena yang terjadi di Indonesia bahwasannya *sustainability report* masih bersifat *voluntary* sedangkan di Singapura mulai akhir tahun 2107 *sustainability report* menjadi *mandotary*. Hal ini menunjukkan tentang adanya manfaat yang didapatkan oleh perusahaan sehingga mereka bersedia untuk melakukan pengungkapan ini. Salah satu manfaat dari pengungkapan *sustainability report* ini adalah dalam hal nilai perusahaan.

Demi terlaksananya pembangunan berkelanjutan, kecenderungan investor akan berubah dari semula yang hanya memilih perusahaan yang berorientasi keuangan saja, menjadi perusahaan yang juga melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Dengan adanya pelaporan *sustainability report*, kepercayaan investor untuk melakukan investasi pada perusahaan akan semakin meningkat. Menurut Sejati (2014) jika nilai perusahaan yang baik diukur dengan kinerja perusahaan dan prospek yang bagus, maka investor akan bersedia membeli saham perusahaan tersebut. Dikarenakan investor lebih memilih untuk berinvestasi pada perusahaan yang transparan karena kepercayaannya terhadap pihak manajemen perusahaan yang lebih tinggi akan peramalan analisis lebih akurat dan informasi yang lebih rendah asimetri. Dengan adanya transparansi dalam *sustainability report* akan dapat meningkatkan kepercayaan *stakeholders* terhadap perusahaan dan citra perusahaan Cahyandito (2010). Hal ini secara langsung dapat menjaga

hubungan baik antara perusahaan dan *stakeholders* termasuk investor sehingga nilai perusahaan di mata investor akan meningkat dengan adanya pengungkapan ini dimana pernyataan tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fatchan dan Trisnawati (2016) yang menyatakan bahwa *sustainability report* berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.

Dalam penelitian Astuti dan Juwenah (2017) menyatakan bahwa kinerja ekonomi berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan, sedangkan kinerja sosial dan lingkungan tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Pada penelitian yang dilakukan Fatchan dan Trisnawati (2016) menemukan bahwa pengungkapan *sustainability report* berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Namun, berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Ramadhani (2016) dan Gunawan dan Mayangsari (2016) yang berkesimpulan bahwa pengungkapan *sustainability report* tidak berpengaruh pada nilai perusahaan.

Dengan demikian terdapat beberapa *reseacrh gap* dalam beberapa penelitian tersebut. Pertama, penggunaan harga saham penutupan perusahaan per 31 Desember sebagai pengukur nilai perusahaan (Astuti dan Juwenah, 2017). Kedua, dalam hal sampel yang digunakan Astuti dan Juwenah (2017) menggunakan sampel yang terbatas pada perusahaan yang terdaftar dalam LQ 45 dan penggunaan sampel perusahaan kategori *high-profile* pada penelitian Ramadhani (2016). Ketiga, tahun pengamatan yang digunakan dalam penelitian di atas menggunakan tahun yang sama dalam mengukur pengaruh *sustainability report* dan nilai perusahaan. Hanya pada penelitian Ramadhani

(2016), terdapat *lag* sebanyak satu tahun antara tahun pengukur pengungkapan *sustainability report* dan tahun pengukur nilai perusahaan. *Research gap* yang terdapat dalam beberapa penelitian di atas menunjukkan bahwa penelitian terkait pengaruh pengungkapan *sustainability report* menarik dan perlu untuk dilakukan pengujian kembali.

Penelitian dilakukan untuk menguji apakah pengaruh mekanisme *corporate governance* berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report* dan akan dilanjutkan untuk mempengaruhi nilai perusahaan pada perusahaan di Indonesia yang terdaftar di BEI.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka di rumuskan sebagai berikut:

1. Apakah Proporsi Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap *Sustainability Report*?
2. Apakah Kepemilikan Saham Institusional berpengaruh positif terhadap *Sustainability Report*?
3. Apakah Kepemilikan Asing berpengaruh positif terhadap *Sustainability Report*?
4. Apakah Jumlah Rapat Dewan Direksi berpengaruh positif terhadap *Sustainability Report*?
5. Apakah Jumlah Rapat Komite Audit berpengaruh positif terhadap *Sustainability Report*?

6. Apakah Kepemilikan Saham Manajerial berpengaruh positif terhadap *Sustainability report*?
7. Apakah *Sustainability Report* berpengaruh positif terhadap Nilai perusahaan?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah penelitian yang ada, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menguji komponen Proporsi Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap *Sustainability Report*.
2. Untuk menguji komponen Kepemilikan Saham Institusional berpengaruh positif terhadap *Sustainability Report*.
3. Untuk menguji komponen Kepemilikan Asing berpengaruh positif terhadap *Sustainability Report*.
4. Untuk menguji komponen Jumlah Rapat Dewan Direksi berpengaruh positif terhadap *Sustainability Report*.
5. Untuk menguji komponen Jumlah Rapat Komite Audit berpengaruh positif terhadap *Sustainability Report*.
6. Untuk menguji komponen Kepemilikan Saham Manajerial berpengaruh positif terhadap *Sustainability Report*.
7. Untuk menguji komponen *Sustainability Report* berpengaruh positif terhadap Nilai Perusahaan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang pengungkapan *sustainability report* yang berkaitan dengan *corporate governance*.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberi ilmu pengetahuan terutama pada fokus akuntansi keuangan dan dalam topik pengungkapan (*disclosure*).
- c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya yang terkait dengan pengungkapan *sustainability report*.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pemicu bagi perusahaan yang belum melakukan pengungkapan *sustainability report*, dan memberikan pemahaman akan pentingnya pengungkapan ini.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi investor atau calon investor dalam pengambilan keputusan untuk melakukan investasi. Investor diharapkan memahami bahwa perusahaan yang telah melakukan *sustainability reporting* berarti telah mempertimbangkan semua aspek mengenai keberlanjutan perusahaan (ekonomi, lingkungan, dan sosial).
- c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana informasi bagi masyarakat. Masyarakat diharapkan dapat mengetahui tentang adanya laporan keberlanjutan yang diungkapkan oleh perusahaan sebagai

bentuk pertanggungjawaban di bidang ekonomi, lingkungan, dan sosial. Perusahaan selain menggunakan sumber daya alam dalam operasional mereka, tapi mereka juga tetap mempertimbangkan semua dampak yang dihasilkan atas kegiatan mereka dan mengungkapkannya di dalam *sustainability report*.

- d. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah tentang pentingnya pengungkapan *sustainability report* di Indonesia. Karena pada dasarnya kegiatan perusahaan tidak dapat lepas dari hubungannya dengan aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial. Oleh karena itu, pengungkapan pertanggungjawaban atas ketiga aspek ini memang layak dan perlu untuk dilakukan. Mungkin dapat diawali dengan mewajibkan pelaporan ini bagi perusahaan publik yang beroperasi di bidang usaha pertambangan dan energi karena bidang ini berkaitan langsung dengan pengelolaan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui